



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan ☎ (021) 727-96157 Fax (021) 727-96462

Jakarta, 4 Januari 2010

Nomor : *KU.03.02.cb/103*
Lampiran : 1 (satu) set KAK Pengadaan Fasilitator

Kepada Yth
Kepala SNVT PBL Propinsi
(terlampir)

Perihal : Pengadaan Fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan, Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) dan Asisten/ Fasilitator PLP-BK TA. 2010

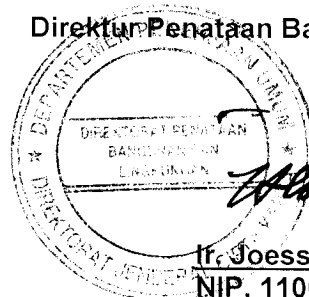
Sehubungan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) serta pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) pada Tahun anggaran 2010, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pendampingan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan TA 2010 dilaksanakan sesuai dengan jumlah fasilitator pada TA 2009 untuk melaksanakan proses pendampingan pemanfaatan dana BLM dan pendampingan pelaksanaan untuk pencairan BLM siklus/ putaran selanjutnya TA 2010, dan kami minta saat ini sudah dilakukan perpanjangan kontrak untuk fasilitator yang masih bertugas di lapangan.
2. Bagi propinsi yang jumlah fasilitatornya telah berkurang dari kuota TA. 2009 karena adanya fasilitator yang mengundurkan diri, maka KMW yang bersangkutan dapat mengusulkan tambahan fasilitator dengan memberikan justifikasi yang disampaikan kepada Kepala SNVT PBL Propinsi dan KMP PNPM Perkotaan dan KMP P2KP Advanced.
3. Pelaksanaan kegiatan PAKET akan dilaksanakan di 107 Kabupaten/Kota dimana 16 Kabupaten merupakan lokasi non PNPM Mandiri Perkotaan, sehingga untuk lokasi PAKET di lokasi Non PNPM Mandiri Perkotaan tersebut diperlukan tambahan personil sebanyak **30 fasilitator yang terdiri dari 7 orang Fasilitator Infra dan 23 orang Fasilitator Manajemen Keuangan.** (daftar rincian terlampir)
4. Pelaksanaan kegiatan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) akan dilaksanakan di 331 kelurahan. Kebutuhan untuk Askorkot sebanyak **64 orang** dan Asisten Manajemen Data sebanyak **31 orang**. Untuk Senior Fasilitator yang saat ini telah dimobilisasi sejak tahun 2009 baru 18 SF, sehingga masih dibutuhkan sebanyak **313 Senior Fasilitator** untuk mendampingi 313 Kelurahan. (daftar rincian terlampir).
5. Komposisi kebutuhan fasilitator, mekanisme dan jadwal pengadaan fasilitator agar dilaksanakan mengacu KAK pengadaan Askorkot, Asmandat dan Fasilitator, sebagaimana terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami minta agar saudara segera melakukan koordinasi dengan Konsultan Manajemen Wilayah di wilayah masing-masing dan KMP Perkotaan maupun KMP P2KP Advanced.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Penataan Bangunan Dan Lingkungan



Joessair Lubis
Ir. Joessair Lubis, CES
NIP. 110026116

Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Direktur Jenderal Cipta Karya (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas PU/ Tarkim/ Ciptakarya Propinsi
3. Team Leader KMP Advance
4. Team Leader KMP PNPM MP
5. Program Director OC PNPM Mandiri Perkotaan
6. Team Leader KMW/ OC Propinsi PNPM mandiri Perkotaan

Lampiran Surat Direktur PBL

Nomor :
Tanggal : Januari 2010
Perihal : Pengadaan Fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan, Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) dan Asisten/Fasilitator PLP-BK TA. 2010

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Kepala SNVT PBL Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
2. Kepala SNVT PBL Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala SNVT PBL Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala SNVT PBL Provinsi Riau;
5. Kepala SNVT PBL Provinsi Kepulauan Riau;
6. Kepala SNVT PBL Provinsi Jambi;
7. Kepala SNVT PBL Provinsi Bengkulu;
8. Kepala SNVT PBL Provinsi Sumatera Selatan;
9. Kepala SNVT PBL Provinsi Bangka Belitung;
10. Kepala SNVT PBL Provinsi Lampung;
11. Kepala SNVT PBL Provinsi Banten;
12. Kepala SNVT PBL Provinsi DKI Jakarta;
13. Kepala SNVT PBL Provinsi Jawa Barat;
14. Kepala SNVT PBL Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala SNVT PBL Provinsi DI Yogyakarta;
16. Kepala SNVT PBL Provinsi Jawa Timur;
17. Kepala SNVT PBL Provinsi Kalimantan Barat
18. Kepala SNVT PBL Provinsi Kalimantan Tengah;
19. Kepala SNVT PBL Provinsi Kalimantan Selatan;
20. Kepala SNVT PBL Provinsi Kalimantan Timur;
21. Kepala SNVT PBL Provinsi Sulawesi Utara;
22. Kepala SNVT PBL Provinsi Gorontalo;
23. Kepala SNVT PBL Provinsi Sulawesi Tengah;
24. Kepala SNVT PBL Provinsi Sulawesi Selatan;
25. Kepala SNVT PBL Provinsi Sulawesi Barat;
26. Kepala SNVT PBL Provinsi Sulawesi Tenggara;
27. Kepala SNVT PBL Provinsi Bali;
28. Kepala SNVT PBL Provinsi Nusa Tenggara Barat;
29. Kepala SNVT PBL Provinsi Nusa Tenggara Timur;
30. Kepala SNVT PBL Provinsi Maluku;
31. Kepala SNVT PBL Provinsi Maluku Utara;
32. Kepala SNVT PBL Provinsi Papua;
33. Kepala SNVT PBL Provinsi Papua Barat;